

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik sosial merupakan realitas kehidupan yang sulit dihindari. Selama manusia masih hidup dalam suatu komunitas, maka sering terjadi persinggungan antara manusia yang satu dengan lainnya, baik antar pribadi, kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok tertentu. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, sedangkan reaksi negatif, yaitu reaksi yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak, sehingga menimbulkan konflik sosial.¹ Umumnya konflik sosial menjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat. Karena begitu banyaknya dimensi yang terdapat di dalamnya, mengakibatkan kurangnya harmonisasi dalam kehidupan.

Konflik sosial telah lama sejak adanya manusia dan masalah ini terjadi karena ketidakteraturan perilaku manusia yang tidak sesuai dengan norma dan tatanan nilai sosial pada masyarakat tertentu. Ketidaksesuaian ini tentu menimbulkan reaksi negatif dan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Konflik ini, jika tidak ada penyelesaian, maka dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. yang dapat menyebabkan berbagai penderitaan dan kerugian, baik secara fisik maupun material.² Konflik inipun terjadi karena persaingan antar individu maupun kelompok dalam mempertahankan hidupnya.

¹Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 1.

²S. Hudijono, *Identifikasi Kearifan Tradisional dalam Penyelesaian Sengketa di Sumba Barat (Buku Pertama dari sebuah Trilogi)*, (Yogyakarta: Aksara Indonesia, 2008), hlm., 9.

³Yulius Bera Tenawahang, *Kearifan Lokal Hak Huke sebagai Resolusi Konflik Tanah pada Suku Lamaholot: Studi Kasus di Desa Belogili* (Thesis S2, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Nusa Cendana: Kupang, 2015), hlm., 6.

Terdapat banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Begitupun konflik sosial yang terjadi pada suku Lamaholot, secara khusus pada masyarakat Belogili. Salah satu contoh konflik sosial yang mencolok adalah konflik tanah, konflik memperebutkan harta warisan dan konflik karena perbedaan pendapat yang menyebabkan korban nyawa. Hasil penelitian membenarkan bahwa sejak tahun 1992-2015 terdapat 506 konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Belogili.³ Konflik ini terjadi karena setiap masyarakat Belogili berusaha mencapai tujuan hidup masing-masing, yang tentunya berdampak pada persaingan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yang berakibat pada konflik. Oleh karena itu, konflik tersebut harus cepat ditangani dan diselesaikan, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun.

Untuk menyikapi masalah tersebut, suku *Lamaholot*,⁴ khususnya masyarakat Belogili memiliki suatu lembaga sosial yang dapat menyelesaikan konflik sosial dengan arif dan bijaksana. Tatanan sosial ini memiliki nilai kepemimpinan yang luhur dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah-konflik sosial. Tatanan sosial tersebut adalah *Ata Kelake* atau *Kabelek Lewo Tana*. Mereka adalah kumpulan orang-orang bukan pilihan masyarakat, melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan kodrati dalam menguasai tatanan norma, nilai-nilai moral, hukum adat dan doa-doa adat. *Ata Kelake* menjalankan tugas yang ditetapkan oleh *Rera Wulan Tana Ekan* dan menjadi *Ata Kelake* adalah tugas penting, karena mereka adalah pemangku adat dan penjaga tradisi keagamaan adat. Mereka ini diyakini oleh masyarakat sebagai orang-orang pilihan *Rera Wulan Tana Ekan*.⁵

⁴Kata *Lamaholot* berasal dari dua kata, yaitu *Lama*, artinya wilayah/bagian dan *Holo*, artinya sambung. *Lamaholot*, artinya gugusan pulau yang bersambung.

⁵Wawancara dengan Bapak Yulius Bera Tenawahang, di Desa Penfui Timur-Matani, Kecamatan Kupang Tengah, tanggal, 10 April 2017.

⁶*Ibid.*

Tatanan sosial ini diyakini oleh masyarakat Belogili sebagai lembaga sekaligus pemegang hukum adat dan norma moral yang mempunyai peran penting dalam seluruh siklus sosial masyarakat, termasuk menyelesaikan konflik sosial. Misalnya, menyelesaikan konflik tanah, konflik harta warisan, masalah peselingkuhan, pencurian dan konflik lainnya dengan arif. *Ata Kelake* merupakan lembaga adat sekaligus hukum adat yang memiliki norma serta tatanan nilai yang menjaga keteraturan sosial. Lembaga ini terdiri dari *Koten* sebagai ketua, *Kelen* sebagai wakil, *Hurit* sebagai penjaga keamanan dan *Maran* sebagai pendoa. *Koten*, *Kelen*, *Hurit* dan *Maran* adalah perwakilan dari setiap suku yang dikepalai *Koten* sebagai *Raja Tua* (pemimpin). Mereka sebagai imam kampung yang membentuk suatu lembaga yang namanya *Ata Kelake* atau *Kabelek Lewo Tana* yang di dalamnya terdapat norma dan nilai sekaligus menjadi pedoman kehidupan bagi masyarakat.⁶ Keberadaan lembaga *Ata Kelake* sebagai penyikap sekaligus dapat menyelesaikan konflik sosial. Sikap ini merupakan suatu kesadaran yang secara spontan berasal dari *Rera Wulan Tana Ekan* karena mereka diyakini oleh masyarakat sebagai representasi dari yang Ilahi yang memiliki pandangan, sikap, nilai dan filosofi dari elemen masyarakat.⁷

Masyarakat Belogili menyakini bahwa *Ata Kelake* sebagai lembaga adat yang adalah representasi dari *Rera Wulan* mampu menyelesaikan konflik sosial. Titah *Ata Kelake* dianggap *geraran*⁸ karena diyakini memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang arif serta memegang teguh norma-norma moral sebagai tatanan nilai yang berasal dari *Rera Wulan Tana Ekan* yang wajib ditaati, jika “Siapa yang melanggar norma atau titah yang disampaikan oleh *Ata kelake* ini,

⁷Frans Amanue, *Rera Wulan the Supreme Being of Lamaholot People*, (MA Thesis, Faculty of Graduate School, University of San Carlos, Cebu City, 1983), hlm. 17

⁸Kata *Geraran* berasal dari bahasa *Lamaholot* yang berarti pemali atau suatu larangan yang tidak boleh dilakukan.

maka akan mendapat malapetaka”.⁹ Dengan demikian, peran dan nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* menjadi pilihan penyelesaian konflik sosial yang tepat, karena jauh lebih mudah dan murah dibandingkan melalui *litigasi*.¹⁰ Bila hukum formal kurang adil dalam menyelesaikan konflik sosial, karena hukum terjebak dalam urusan ke dalam, seperti kepastian, sistem logika dan peraturan, maka masyarakat memilih cara penyelesaian sendiri,¹¹ yaitu melalui *Ata Kelake*.

Menarik bahwa **masyarakat Belogili memiliki nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* yang dapat menyelesaikan konflik sosial. Konflik yang terjadi dengan intensitas yang sangat tinggi, tetapi dengan intensitas tinggi pula diselesaikan dengan peran *Ata Kelake*. Terdapat 506 konflik yang terjadi hanya 11 atau 2, 17 persen yang dilaporkan ke pengadilan, sedangkan 480 atau 94,86 persen dengan cara *Ata Kelake*. Di sini, sangat jelas nilai kepemimpinan *Ata Kelake*, warisan leluhur sebagai “hakim yang adil”. Nilai-nilai kebijaksanaan *Ata Kelake* terlihat dalam (1) melakukan keputusan dengan adil; (2) tidak membedakan antara anak atau istri atau keluarganya; (3) mendengarkan pendapat masyarakat; (4) tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu; (5) melindungi kepentingan masyarakatnya; dan (6) keputusan mereka berlaku bagi semua orang dan berlaku turun-temurun. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa nilai dan peran kepemimpinan berlaku *universal* bagi masyarakat Belogili maupun masyarakat pendatang yang menetap di Belogili.**¹²

Merujuk pada fakta yang ada, maka putusan-putusan *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik tidak menimbulkan permasalahan baru. Hal ini terjadi karena keputusannya sangat konsisten, berpihak pada kebenaran, tidak menimbulkan konflik baru dan tidak menimbulkan dendam para pihak. Demikian, pentingnya peran *Ata Kelake*, maka gagasan menyikapi konflik

⁹Frans Amanue, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹⁰*Litigasi* merupakan penyelesaian masalah atau konflik dengan menggunakan hukum formal dan dilaksanakan di pengadilan melalui proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku

¹¹Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Buku Kompas, 2010), hlm. 57.

¹²Yulius Bera Tenawahang, *Op.Cit.*, hlm.10

sosial di Belogili berbasis nilai-nilai kepemimpinan *Ata kelake* yang pada prinsipnya mendidik masyarakat. Gagasan ini merupakan usaha mendidik warga masyarakat dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan tanpa kekerasan. Penyelesaian konflik sosial berbasis nilai-nilai budaya ini berkaitan dengan aspek-aspek budi pekerti luhur yang dibangun masyarakat atas dasar kepentingan bersama. Model penyelesaian seperti ini diharapkan dapat tercipta masyarakat yang jujur dan demokratis serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai budaya dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Akhirnya, rasa tertarik pada nilai dan peran kepemimpinan *Ate Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial di Belogili, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul: NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN *ATA KELAKE* SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK SOSIAL: STUDI DI DESA BELOGILI-KABUPATEN FLORES TIMUR.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latarbelakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa persoalan penelitian yang akan dibahas sebagai berikut;

1. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Belogili?
2. Siapa itu *Ata Kelake*?
3. Bagaimana peran *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Belogili?
4. Nilai-nilai kepemimpinan apa sajakah yang dimiliki *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Belogili?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada isu konflik sosial masyarakat Belogili dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan keadaan dan konflik sosial yang terjadi di Belogili.
2. Mendeskripsikan *Ata Kelake*

3. Mendeskripsikan nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial
4. Mendeskripsikan peran *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya mengenai penyelesaian konflik sosial berbasis nilai-nilai budaya lokal, lebih merupakan prioritas pada *nilai-nilai Ata Kelake* sebagai resolusi konflik sosial di Kabupaten Flores Timur.

1.4.2. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi bagi para pemimpin pemerintahan maupun pengadilan dalam menyelesaikan konflik sosial di Flores Timur dengan lebih cepat, benar dan adil.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mendidik masyarakat, agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sebagai daya dukung integrasi budaya nasional.
3. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan data dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik sosial pada suku *Lamaholot* di Flores Timur, NTT

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah, yang berupaya mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi data sampai pada kedalamannya. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis dan interaksi simbolis.

Fenomenologis maksudnya bahwa peneliti mengidentifikasi esensi pengalaman manusia tentang fenomena. Sedangkan dengan interaksi simbolis, peneliti menguraikan semua perilaku manusia yang melekat pada dunia sekitarnya dalam tiga premis sehubungan dengan hal tersebut antara lain; (1). Manusia bertindak terhadap sesuatu (orang) berdasarkan bagaimana mereka memberikan arti terhadap sesuatu tersebut; (2). Makna merupakan produk sosial yang muncul dari interaksi sosial; dan (3). *social actor*, memberikan makna melalui proses interpretasi. Peneliti mencoba menjejaki setiap dinamika dan fenomena sambil mengungkapkan makna yang tersimpan di dalamnya. Di sini, peneliti berusaha memahami bagaimana kehidupan sosial dahulu dan sekarang, maka harus memahami dari sudut pandang pelaku itu sendiri.¹³

1.5.2. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut, peneliti menggunakan instrumen, yaitu peneliti sendiri sebagai alat penelitian utama. Peneliti bertindak sebagai instrumen dengan memperoleh pengalaman pertama dari sumber utama di lapangan serta dapat melakukan wawancara langsung dengan informan. Peneliti berusaha berada langsung di tempat penelitian untuk secara intensif mengumpulkan data dengan teknik-teknik pengumpulan data yang ditentukan. Ia sekaligus membuat perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, menafsir dan pada akhirnya melaporkan penelitian.¹⁴

1.5.3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata, nilai-nilai dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain. Data utama merupakan hasil usaha kombinatif kegiatan indera peneliti dalam melihat mendengar dan bertanya seputar

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2013), hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

resolusi konflik berdasarkan masalah sosial dan nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* yang diperoleh dari pengalaman dan observasi peneliti di lokasi penelitian.¹⁵

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data¹⁶

Data penelitian ini didapat dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen dengan menggunakan fasilitas perekaman dan pencatatan data, sebagai berikut;

1. Observasi di lapangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh penan dan nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake*, masalah sosial dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh *Ata Kelake*. Peneliti ikut berperan serta secara langsung dalam rangkaian kegiatan kehidupan masyarakat dan ditopang pula dengan penggunaan alat perekam data, rekaman video, foto serta membuat catatan lapangan, mencatat apa yang direkam, uraian tentang orang-orang yang diamati dan memberikan tanggapan mengenai informasi yang dikumpulkan
2. Wawancara Mendalam: Wawancara difokuskan pada pengetahuan dan pengalaman pribadi informan tentang penyelesaian masalah sosial. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terbuka dan mendalam guna menjangkau pandangan mereka tentang makna nilai-nilai kepemimpinan.
3. Studi Kepustakaan. Dalam rangka memperkaya dan memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti tentang masalah yang dikaji, maka peneliti menelusuri, mencatat dan mempelajari kepastakaan-kepastakaan yang relevan dengan objek kajian yang sudah dipublikasikan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Peneliti, dalam menganalisis data menerapkan teknik analisis yang terdiri (1). Reduksi data; peneliti mereduksi, seperti membuat ringkasan, mengkode menelusuri tema dan mengelompokan data; (2). Kategorisasi data adalah proses penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; dan (3). Sintesis: tahap

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 157

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 158

ini tujuannya mensintesis data yang dimulai dari permulaan pengumpulan data, kemudian berlanjut dengan menggali makna berbagai fakta.

Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan secara mendalam dengan menggunakan metode *hermeneutis*¹⁷ dan refleksi. Hermeneutis digunakan untuk menginterpretasi data dari tua-tua adat maupun informan yang berkompeten dalam budaya setempat melalui wawancara mendalam.¹⁸ Sedangkan metode refleksi digunakan peneliti sebagai kegiatan permenungan atas problem yang diteliti, yakni nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* dalam menyelesaikan masalah sosial di Belogili.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan tulisan ini dibagi dalam lima bab. Bab pertama merupakan *Pendahuluan*. Dalam bab ini penulis menguraikan; konflik sosial, nilai-nilai kepemimpinan, peran kepemimpinan *Ata Kelake* dan nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat Belogili. Selanjutnya dalam *Bab dua*, penulis menyajikan gambaran umum tentang Kabupaten Flores Timur, masyarakat Belogili, yakni mengenai sejarahnya, data-data statistik tentang wilayah dan kependudukannya, kondisi social, konflik yang terjadi dan disertakan uraian singkat tentang harmonisasi sosial sebagai lokus penelitian.

Bab tiga, penulis menguraikan tentang peran kepemimpinan *Ata Kelake* dan proses penyelesaian konflik sosial pada masyarakat Belogili. *Bab empat* dari karya ini berisi tentang nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial. Sedangkan pada bab *lima* merupakan bab penutup. Dalam bagian penutup ini diuraikan kesimpulan akhir dari penulis

¹⁷ *Hermeneutika* berasal dari Bahasa Inggris *hermeneutic*, dalam bahasa Yunani *hermeneutikos* yang berarti *penafsiran*. *Hermeneutika* berarti ilmu atau teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya baik secara obyektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi-variasi historisnya) maupun secara subjektif (maksud pengarang). Bandingkan, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 283

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 160

tentang nilai-nilai kepemimpinan *Ata Kelake* dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat Belogili.